



# Laporan Tahunan

## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2006



**SAMBUTAN KETUA KOMITE KONSULTATIF  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**K**omite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Setelah SAP ditetapkan, tugas berikutnya dari KSAP adalah melakukan sosialisasi dan membantu implementasi SAP pada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, SAP berbasis akrual sudah harus dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk tahun anggaran 2009. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pada tahun 2006, KSAP telah melakukan kajian-kajian dan mulai menyusun draf SAP berbasis akrual.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2006 tersebut, telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan 2006, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para *stakeholders*, khususnya Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja SAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2006 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 4 April 2007

Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Herry Purnomo

**PENGANTAR KETUA KOMITE KERJA  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Laporan Tahunan 2006 ini disusun sebagai suatu media akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kinerja KSAP kepada Menteri Keuangan dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Laporan ini memuat kegiatan dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2006.

Setelah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP terus berupaya mendorong implementasi SAP melalui sosialisasi, lokakarya, *Training of Trainers* (TOT), *help desk* serta penyusunan buletin-buletin teknis.

Selain itu, beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan KSAP pada tahun 2006 adalah penyusunan draf SAP berbasis akrual yang terdiri dari Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP); dan penyelesaian penerjemahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ke dalam Bahasa Inggris.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan KSAP, Laporan Tahunan 2006 ini juga telah memuat informasi keuangan KSAP Tahun 2006.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif SAP, para anggota Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami merasa Laporan Tahunan 2006 belum sempurna, sehingga saran-saran sangat kami harapkan agar penyusunan laporan tahunan berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, 4 April 2007

Ketua Komite Kerja,

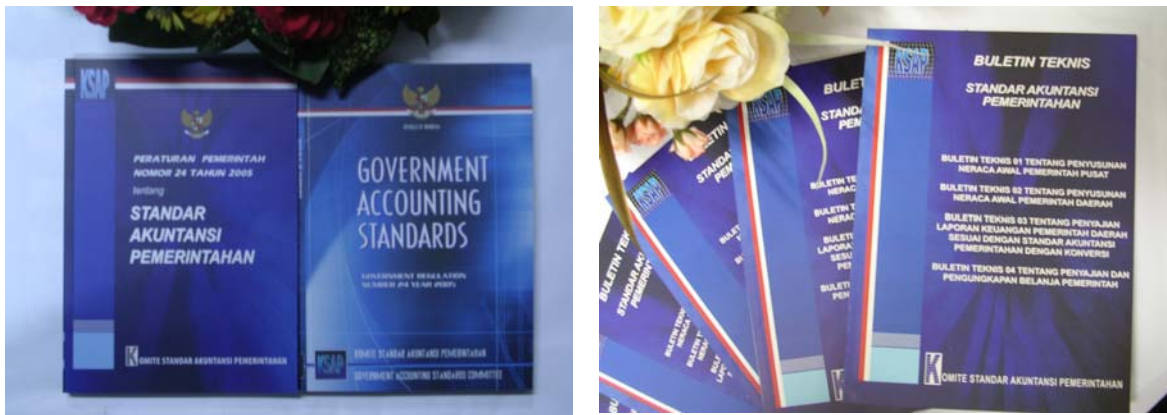
Binsar H. Simanjuntak

## DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif.....	1
Sambutan Ketua Komite Kerja.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Organisasi dan Kedudukan KSAP .....	4
B. Tugas Pokok KSAP .....	6
BAB II RENCANA KERJA KSAP .....	8
A. Lingkungan Strategis.....	8
B. Rencana Strategis .....	8
BAB III KINERJA KSAP .....	13
A. Capaian Kinerja .....	13
C. Pelaksanaan Kegiatan .....	13
D. Aspek Keuangan.....	19
E. Kendala dan Strategi Pemecahannya .....	20
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2007 .....	21
BAB V PENUTUP.....	24

# BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden. Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

## ***A. Organisasi dan Kedudukan KSAP***

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 84 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 2 Tahun 2005 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan dan mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan (*due process*). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

### **Komite Konsultatif:**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Anggota;
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sebagai Anggota;
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sebagai Anggota;
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebagai Anggota;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sebagai Anggota;
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi Universitas Indonesia sebagai Anggota.

### **Komite Kerja:**

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak.,MM sebagai Anggota;
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc sebagai Anggota;
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc.,CGFM sebagai Anggota;
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM sebagai Anggota;
9. Gatot Supiarsono, Ak., M.Acc sebagai Anggota;



*Tim Konsultatif dan Tim Kerja KSAP (Dokumentasi Sekretariat KSAP, 2006)*

### **B. Tugas Pokok KSAP**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 2 Tahun 2005 dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP dalam perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 6 Oktober 2006 dengan KEP-548/KSAP/X/2006 beranggotakan 25 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua;
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MBA, Wakil Ketua;
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota;
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
5. Amdi Very Dharma, Ak., MAcc, Anggota;
6. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA, Anggota;
7. Dr. Haryono Umar, Ak., MSc., Anggota;
8. Drs. I Made Suryawan, Anggota;
9. Pasni Rusli, Anggota;
10. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
11. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
12. Chalimah Puji Astuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota;
13. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota;
14. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota;
15. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
16. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
17. R. Wiwin Istanti, SE, Ak., Anggota; (s.d Juni 2006)
18. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota;
19. Farida Aryani, Ak., Anggota;
20. Eli Tamba, SE, Ak., Anggota;
21. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
22. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota;
23. Syaiful, SE, Ak., Anggota;
24. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
25. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota;
26. Mei Ling SE, Ak., MBA, Anggota. (mulai Juli 2006)

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.06/2006, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Pasni Rusli, Ketua;
2. Mulat Handayani, Wakil Ketua;

3. Rahayu Puspasari, Anggota;
4. Edward UP Nainggolan, Anggota;
5. Yulia Candra Kusumarini, Anggota;
6. Joko Supriyanto, Anggota;
7. Hamim Mustofa, Anggota;
8. Yusron Kamal, Anggota;
9. Andri Fuadhy, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



*Rapat Pleno Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), 27 November 2006 (Dokumentasi KSAP, 2006)*



## **BAB II RENCANA KERJA KSAP**

Sesuai dengan tugas yang diembannya, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah berupa rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja ini disusun sesuai dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Berbagai hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan KSAP dalam mencapai kinerjanya.

### ***A. Lingkungan Strategis***

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Pusat/Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir mulai tahun anggaran 2006. Dengan demikian Pemerintah perlu segera membangun sistem akuntansi yang mengacu kepada SAP. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda lagi karena hanya ada waktu satu tahun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SAP supaya dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah dan pengguna laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah kesesuaian laporan yang dimaksud dengan SAP. Dengan telah diterbitkannya PP tentang SAP, maka Pemerintah Pusat/Daerah sudah wajib menerapkan SAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis tersebut, KSAP memiliki komitmen untuk selalu bekerja secara terarah dan terencana, dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis KSAP. Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis pada dasarnya mengarah pada pemberlakuan SAP yang dapat diterima oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.

### ***B. Rencana Strategis***

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

#### ***Visi :***

*"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"*

**Misi :**

1. Mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

**Tujuan:**

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini.

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1: Rencana Kerja Tahun 2004 s.d. Tahun 2007**

<b>A. Tahun 2004</b>	
1. Penerbitan PP SAP	1. Penyusunan draf PP SAP 2. Pembahasan dengan Setneg untuk penerbitan PP SAP
2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP	1. Penyusunan buletin teknis SAP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neraca Awal</li> <li>▪ Bagan Perkiraan Standar</li> </ul> 2. Penyusunan interpretasi SAP ( 5 ISAP)
3. Sosialisasi PP SAP	Pelaksanaan Sosialisasi PP SAP di lima kota
4. Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	1. Penyusunan standar akuntansi berbasis akrual (KK + 7 PSAP) – Sesuai due process KSAP kecuali public hearing dan permintaan pertimbangan BPK 2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual 3. Finalisasi Draf SAP akrual
5. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional Seminar/kongres/konferensi internasional
<b>B. Tahun 2005</b>	
1. Penyusunan SAP dan Derivasinya	1. Finalisasi RPP tentang SAP 2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP 3. Penyusunan Draf SAP berbasis akrual <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan 4 Draf SAP berbasis akrual</li> <li>▪ Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i></li> <li>▪ Pelaksanaan <i>Public Hearing</i></li> <li>▪ Finalisasi Draf SAP</li> </ul>
2. Peningkatan Kompetensi SDM dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi SAP di 7 kota 2. Pengembangan SDM KSAP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>

<b>c. Tahun 2006</b>	
1. Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual</li> <li>2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual</li> <li>3. Pelaksanaan <i>Public Hearings</i></li> <li>4. Finalisasi Draf SAP akrual</li> </ol>
2. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lokakarya (Workshop)</li> <li>2. Penyelenggaraan Helpdesk</li> <li>3. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>4. Pelaksanaan Training of Trainers</li> </ol>
3. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>
<b>d. Tahun 2007</b>	
1. Draf PSAP berbasis Akrual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual</li> <li>2. Pelaksanaan <i>Public Hearings</i></li> <li>3. Penyempurnaan DP Kerangka Konseptual dan PSAP berbasis akrual</li> </ol>
2. Penerbitan PP Standar Akuntansi berbasis Akrual	
3. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lokakarya/Workshop</li> <li>2. Penyelenggaraan Helpdesk</li> <li>3. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>4. Pelaksanaan Training of Trainers</li> </ol>
4. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2006 adalah sebagai berikut:

## 1. *Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya*

### a. **Penyusunan draf SAP berbasis akrual**

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU1/2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk itu KSAP telah mulai menyusun draf SAP berbasis akrual mulai tahun 2005. Indikator kegiatan ini berupa terselesaikannya draf kerangka konseptual draf PSAP berbasis akrual. Pada tahun ini sasaran kinerja KSAP adalah penyusunan draf 1 (satu) kerangka konseptual dan 11 (sebelas) draf SAP berbasis akrual.

### b. **Penyelenggaraan *Limited Hearing* DPSAP Berbasis Akrual**

Sesuai dengan due process penyusunan SAP, KSAP akan melaksanakan 1 (satu) kali limited hearing atas draf SAP berbasis akrual. Tujuan limited hearing adalah untuk mendapatkan masukan atas draf SAP yang disusun. Peserta limited hearing diharapkan berasal dari para akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

### c. **Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP**

KSAP akan menerbitkan Interpretasi SAP (IPSAP) yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari kesalahan tafsir para pengguna SAP. KSAP juga akan menerbitkan buletin teknis untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP

maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terbitnya 2 (dua) IPSAP dan 2 (dua) buletin teknis.

## **2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan**

### **a. Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis**

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk tahun anggaran 2005. Untuk itu, KSAP akan mengadakan workshop mengenai SAP dan buletin teknis sebanyak 4 kali. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2005.

### **b. TOT SAP (*cash toward accrual*)**

Sumber daya manusia KSAP masih sangat terbatas untuk dapat melayani seluruh pengguna (user) SAP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu KSAP merencanakan untuk mengadakan *Training of Trainers* (TOT) yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi para calon pengajar di luar KSAP yang akan mensosialisasikan SAP.

### **c. Pengembangan kemampuan SDM KSAP**

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimi para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

## **3. Lain-lain**

### **a. Pemeliharaan Website KSAP**

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berakitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

### **b. Penyelenggaraan Help Desk**

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP akan membentuk *help desk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

### **c. Survei/Riset Implementasi SAP**

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut.

**d. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

## **BAB III KINERJA KSAP**

### ***A. Capaian Kinerja***

Sejak awal pembentukannya, KSAP telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mengarah pada penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Sampai dengan akhir tahun 2005 KSAP telah menyelesaikan penyusunan Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Nomor 1 s.d. 11) yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta menetapkan 2 (dua) Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis No. 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Kegiatan penyusunan dan penyempurnaan SAP beserta derivasinya masih terus dilaksanakan oleh KSAP pada tahun 2006 dan pada tahun-tahun berikutnya. Capaian kinerja KSAP pada tahun 2006 adalah:

- Penyusunan draf SAP berbasis akrual (Kerangka Konseptual dan 11 Pernyataan SAP).
- Penetapan Buletin Teknis No. 3 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi, dan Buletin Teknis No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
- Penyusunan 2 (dua) draf buletin teknis, yaitu Buletin Teknis tentang Penyusutan dan Buletin Teknis tentang Leasing.
- Penyelenggaraan Workshop SAP dan Buletin Teknis.
- Penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) SAP.
- Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri.
- Translasi PP 24/2005 tentang SAP ke dalam Bahasa Inggris.
- Sosialisasi SAP pada beberapa Pemda dan Perguruan Tinggi.

### ***C. Pelaksanaan Kegiatan***

#### ***1. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya***

##### **Kegiatan 1: Penyusunan draf SAP berbasis akrual**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual selambat-lambatnya tahun 2008. Oleh karena itu sesuai dengan rencana lima tahunan, KSAP akan mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Sampai dengan akhir tahun 2005, KSAP telah menyusun 8 (delapan) draf SAP berbasis akrual dengan menggunakan pendekatan adopsi IPSAS dan dengan menyesuaikannya kondisi dan kebutuhan pemerintah. Kedelapan draft SAP berbasis akrual tersebut adalah:

1. Kerangka Konseptual;

2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Arus Kas;
4. Surplus/Defisit Periode Berjalan, Koreksi Kesalahan, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi;
5. Dampak Perubahan Kurs Valuta Asing;
6. Akuntansi Biaya Pinjaman;
7. Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
8. Akuntansi Investasi pada Rekan Usaha.

Seiring dengan perjalanan waktu, penyusunan draf SAP berbasis akrual mengalami penajaman strategi dalam penyusunannya. SAP berbasis akrual yang semula disusun dengan cara mengadopsi IPSAS tersebut, pada tahun 2006 berubah menjadi penyusunan draft SAP berbasis akrual dilakukan dengan cara menyesuaikan PSAP *cash toward accrual* (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan PSAP berbasis akrual yang diadaptasi dari IPSAS.

Keputusan mengubah strategi ini didasari pertimbangan antara lain:

- SAP *cash toward accrual* telah disusun dengan mengacu pada beberapa referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS dan GFS, sehingga diharapkan SAP *cash toward accrual* yang akan disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum;
- Mengurangi resistensi dari para pengguna terhadap SAP;
- Pengguna SAP masih dalam tahap belajar, perlu waktu yang cukup lama untuk memahaminya sehingga SAP akrual yang berbeda jauh dengan SAP *cash toward accrual* akan menimbulkan resistensi di kalangan para pengguna;
- Penyusunan SAP berbasis akrual relatif menjadi lebih mudah;\Sebagian dari PSAP *cash toward accrual* (PSAP Nomor 01, 05, 06, 07, 08) sudah berbasis akrual sehingga hanya diperlukan beberapa PSAP berbasis akrual untuk melengkapinya;
- Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP *cash toward accrual* lebih mudah bagi para pengguna standar karena mereka sudah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP *cash toward accrual*.

Selama tahun 2006, KSAP telah menyusun draf SAP berbasis akrual sebanyak satu Kerangka Konseptual dan 11 (sebelas) draf PSAP. Keseluruhan draft yang berhasil disusun pada tahun 2006 adalah:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Akuntansi Persediaan;
7. Akuntansi Investasi;
8. Akuntansi Aset Tetap;
9. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
10. Akuntansi Kewajiban;
11. Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Estimasi dan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Mendasar dan Pos Luar Biasa; dan
12. Laporan Keuangan Konsolidasian

## Kegiatan 2: Penyelenggaraan Limited Hearing Draf SAP Berbasis Akrua

Pada bulan Desember 2006, KSAP menyelenggarakan *Limited Hearing* dengan tema "Penyusunan SAP Berbasis Akrua". *Limited Hearing* ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat dan masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi di bidang akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan SAP berbasis akrua. Dari penyelenggaraan *Limited Hearing* tersebut, didapatkan masukan yang berharga bagi penyusunan standar berbasis akrua.



*Penyelenggaraan Limited Hearing  
Penyusunan Standar Akuntansi  
Pemerintahan Berbasis Akrua di  
Jakarta, 19 Desember 2007  
(Dokumentasi Sekretariat KSAP,  
2006)*

## Kegiatan 3: Penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi SAP

Pada tahun 2006 ini, KSAP berhasil menetapkan 2 (dua) buletin teknis, yaitu:

1. *Buletin Teknis No. 3 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi; dan*
2. *Buletin Teknis No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.*

Kedua buletin teknis tersebut melengkapi buletin teknis yang telah ditetapkan pada tahun 2005, yaitu:

1. *Buletin Teknis SAP Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat; dan*
2. *Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.*

Selain itu, pada tahun 2006 ini KSAP telah menyusun 2 (dua) draf buletin teknis, yaitu

1. *Buletin Teknis tentang Penyusutan; dan*
2. *Buletin Teknis tentang Leasing.*



## 2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

### Kegiatan 1: Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis

Pada tahun 2006 ini KSAP telah menyelenggarakan workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis. Workshop yang diadakan pada bulan Maret 2006, ditujukan untuk para pejabat di lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Workshop tersebut bertema "Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan". Tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk membantu Pemda dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PP 24/2005. Workshop diadakan di 3 (tiga) kota yaitu:

1. Jakarta, tanggal 8 - 9 Maret 2006
2. Denpasar, tanggal 14 - 15 Maret 2006
3. Medan, tanggal 28 - 29 Maret 2006

Peserta workshop rata-rata berkisar 200 orang di setiap tempat, yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.



*Workshop "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2005 Sesuai Dengan PP. No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan" di Jakarta, 8 s.d.9 Maret 2006 (Dokumentasi Sekretariat KSAP, 2006)*

### Kegiatan 2: *Training of Trainers (TOT) SAP (cash toward accrual)*

Sebagai tindak lanjut dari program penyebaran SAP, serta mengingat besarnya animo masyarakat pengguna SAP akan pelaksanaan *Training of Trainer (TOT)* oleh KSAP, maka pada tahun 2006 KSAP telah menyelenggarakan *TOT SAP*. *TOT* dilakukan dalam kaitannya dengan tugas pokok Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Keppres 84 tahun 2004, yaitu melakukan sosialisasi awal Standar Akuntansi Pemerintahan beserta produk lain yang dihasilkan KSAP. Pelaksanaan *TOT* dimaksudkan untuk memupuk bibit-bibit yang akan melakukan diseminasi produk KSAP secara lebih luas dan mendalam.

*TOT* dilaksanakan dalam 2 angkatan di dua tempat yaitu:

1. Angkatan I di Jakarta, pada tanggal 10 -14 Juli 2006
2. Angkatan II di Surabaya, pada tanggal 24 – 28 Juli 2006

Peserta *TOT* sebanyak 35 orang dalam satu angkatan. Peserta diambil dari seluruh pelamar/calon peserta yang berminat untuk mengikuti *TOT* sejumlah kurang lebih 135 orang.

Sebelum mengikuti *TOT*, peserta harus memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditetapkan oleh KSAP antara lain:

- Sarjana Ekonomi (diutamakan jurusan Akuntansi);
- Berkecimpung langsung dalam bidang akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- Memiliki kemampuan mengajar/memberikan asistensi;
- Bersedia menjadi fasilitator KSAP apabila diperlukan;
- Dapat mengoperasikan komputer;

Materi *TOT* mencakup:

- Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Hubungan antara sistem dan standar akuntansi;
- Tinjauan terhadap PP 58/ 2005, serta Permendagri 13/2006;
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
- Struktur, Siklus dan Akuntansi Anggaran;
- Akuntansi dan praktik Penyusunan Laporan Keuangan;
- *Pre Test* dan *Post Test*, serta.
- Presentasi dari masing-masing peserta *TOT*



*Training of Trainer (TOT) mengenai SAP  
(Dokumentasi Sekretariat KSAP, 2006)*

### **Kegiatan 3: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP**

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

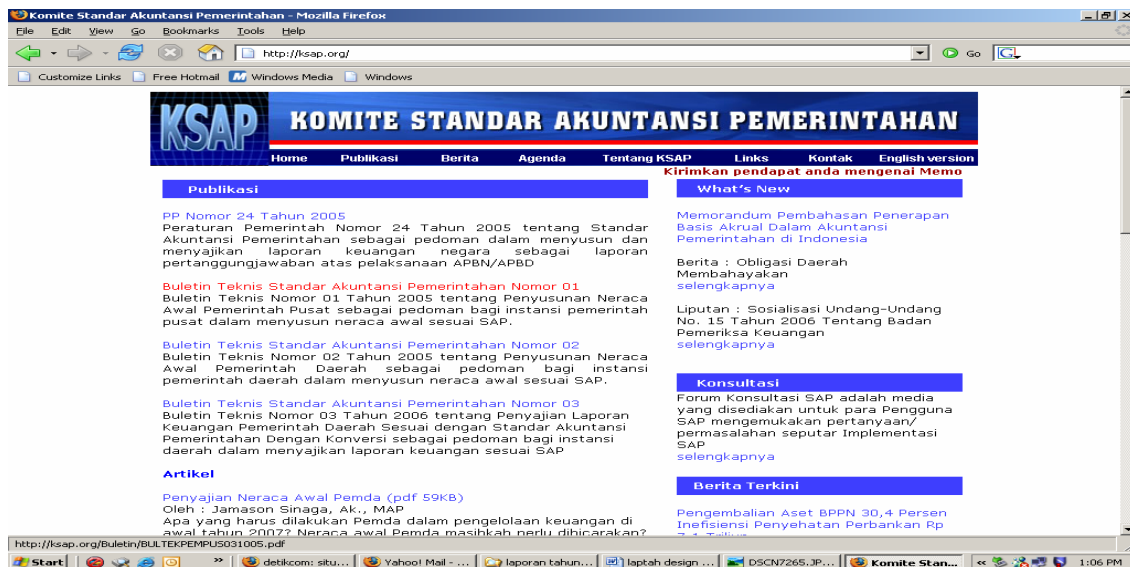
1. *Video tele conference* Seminar Internasional Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, 24 Maret 2006;
2. ASEM-IFRSs Seminar, Shanghai, RRC 25-26 Maret 2006;
3. *The International Seminar on Accounting IFRS Implementation*, Jakarta 31 Mei 2006;
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan V dan IV, Juli 2006;
5. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23 – 26 Agustus 2006;

6. Pelatihan Program Aplikasi Pembukuan Bendahara, Denpasar, 4 - 9 September 2006;
7. 4Th International Conference on Accounting, Siena, Italia, 7 – 9 September 2006;
8. *World Congress of Accountants*, Istanbul, Turkey, 13-16 November 2006.

#### Kegiatan 4: Pemeliharaan Website KSAP

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP juga telah membangun Website KSAP dengan alamat : <http://www.ksap.org>. yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan Website ditujukan pada ekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung website. Pada website tersebut juga tersedia email untuk para anggota KSAP.

Selama tahun 2006, KSAP telah berhasil meng *up-grade* tampilan maupun isi dari situs KSAP. Perbaikan tampilan dimaksudkan agar situs KSAP menjadi lebih menarik dan lebih informatif serta memberikan peluang lebih luas kepada pengunjung situs. Selain itu dengan tambahan menu English Version pada tampilan yang baru diharapkan dunia internasional dapat mengenal produk-produk KSAP terutama Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah tersedia dalam versi bahasa Inggris. Kegiatan pemeliharaan lainnya adalah meng-*update* berita, produk-produk maupun link dengan kegiatan reformasi keuangan negara lainnya.



Keterangan : Tampilan Website KSAP <http://www.ksap.org>

#### Kegiatan 5: Penyelenggaraan Help Desk

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *help desk* yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Komite Kerja tanggal 5 Oktober 2006. Tim ini terdiri dari 4 (empat) orang Komite Kerja, dan 9

orang Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya. Selama tahun 2006 sebanyak kurang lebih 26 pertanyaan telah ditanggapi oleh KSAP secara tertulis dan telah dipublikasikan dalam *website* KSAP.

### **Kegiatan 6: Penerjemahan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP ke dalam Bahasa Inggris**

Pada tahun 2006, KSAP telah menyelesaikan penerjemahan PP SAP dalam bahasa Inggris. Penerjemahan PP SAP ini pada awalnya dilakukan oleh World Bank, sedangkan KSAP bertugas mereview hasil terjemahan tersebut. Namun, karena hasil terjemahan tersebut terdapat banyak kekurangan, maka KSAP memutuskan untuk menerjemahkan sendiri PP SAP ke dalam bahasa Inggris. SAP dalam bahas Inggris telah diberikan kepada Kedubes negara-negara sahabat di Jakarta serta dapat di download dari situs KSAP.

### **Kegiatan 7: Pelayanan Publik**

Pada tahun 2006, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya. untuk menjadi nara sumber tentang SAP.

## ***D. Aspek Keuangan***

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2006, KSAP mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3.231.810.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan – Departemen Keuangan. Untuk mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2006, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp2.970.812.390 atau sekitar 91,92 % dari pagu anggaran.

Ringkasan Realisasi pengeluaran per jenis belanja atas anggaran KSAP dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Kode Belanja	Jenis Belanja	Jumlah (dalam Rupiah)	
		Anggaran	Realisasi
51	Belanja Pegawai		
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	559.800.000	529.100.000
52	Belanja Barang		
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.204.600.000	2.092.098.190
524111	Belanja Perjalanan Biasa	437.080.000	357.479.450
53	Belanja Modal		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.330.000	29.800.000
	<b>Total Belanja</b>	<b>3.231.810.000</b>	<b>2.970.812.390</b>

Laporan Keuangan KSAP secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

### ***E. Kendala dan Strategi Pemecahannya***

Pada tahun 2006 ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KSAP, antara lain adalah sejak awal pembentukannya, sebagian besar anggota KSAP (Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat) berasal dari pegawai di lingkungan pemerintahan yang mempunyai tugas pokok masing-masing, sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas. Untuk memecahkan kendala tersebut di atas, KSAP melakukan beberapa upaya, yaitu: mengefektifkan setiap agenda kegiatan rapat dan penyelesaian pekerjaan dan meneliti kembali skala prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Selain itu, pada tahun 2007 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan telah dibentuk Subdirektorat Pengembangan Standar Akuntansi. Dengan dibentuknya organisasi setingkat subdirektorat tersebut diharapkan akan mendukung pelaksanaan tugas KSAP.

## BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2007

Untuk mendukung implementasi SAP tahun 2007 dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2007 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Penyusunan SAP Berbasis Akrual

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk mendukung terlaksananya amanat tersebut, KSAP pada tahun 2007 akan melakukan pembahasan dan finalisasi draf Kerangka Konseptual dan 11 (sebelas) draf PSAP berbasis akrual serta tambahan 2 (dua) PSAP berbasis akrual. Pada tahun 2007 KSAP merencanakan menyampaikan Draft PSAP berbasis akrual kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk mendapatkan pertimbangan.

### 2. Penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi PSAP

Pada tahun 2007 KSAP akan melakukan finalisasi 2 (dua) buletin teknis SAP dan menyusun 2 (dua) buletin teknis SAP. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap *issue* tertentu yang ditemui dalam SAP berbasis kas menuju akrual, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

### 3. Penyelenggaraan *Limited Hearing* dan *Public Hearing* DPSAP Berbasis Akrual

Sesuai dengan *due process* penyusunan SAP, KSAP akan melaksanakan 1 (satu) kali *limited hearing* dan *public hearing* atas draf SAP berbasis akrual (draf Kerangka Konseptual dan 11 (sebelas) draf PSAP berbasis akrual serta tambahan 2 (dua) PSAP baru). Tujuan *limited hearing* dan *public hearing* adalah untuk mendapatkan masukan atas draf SAP yang disusun. Peserta *limited hearing* dan *public hearing* diharapkan berasal dari para akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

### 4. Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis

Pada tahun 2007 KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai SAP dan buletin teknis. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan.

### 5. TOT SAP (*cash toward accrual*)

Sumber daya manusia KSAP masih sangat terbatas untuk dapat melayani seluruh pengguna (user) SAP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2006 KSAP telah mengadakan *Training of Trainers* (TOT) SAP. Untuk itu, pada tahun 2007, KSAP akan mengadakan lagi *Training of Trainers* (TOT) yang bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan dan kompetensi para calon pengajar di luar KSAP yang akan mensosialisasikan SAP.

## **6. Pemeliharaan Website KSAP**

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

## **7. Pemeliharaan Help Desk**

Tim Help Desk yang telah dibentuk pada tahun 2006 akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2007. Diharapkan dari penyelenggaraan help desk ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

## **8. Pengembangan SDM KSAP**

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

## **9. Survei/Riset Implementasi SAP**

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut. Selain itu, riset juga dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan implementasi SAP berbasis akrual.

## **10. Kajian Kepustakaan terhadap Penerapan *Accrual Budgeting (Limited Discussion)***

Dalam penerapan penganggaran yang berbasis akrual (*accrual budgeting*) sebagaimana diamanatkan UU 17/2003, terlebih dahulu harus disiapkan/didukung oleh akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*). Untuk itu, pada tahun 2007 KSAP akan melakukan kajian dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka tentang penerapan *accrual budgeting*. Setelah bahan/materi terkumpul akan dilakukan diskusi terbatas (*limited discussion*) yang membahas penerapan *accrual budgeting*.

## **11. Penyusunan Kamus Istilah Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama terhadap suatu istilah dalam akuntansi pemerintahan dan juga untuk mempermudah para pengguna akuntansi pemerintahan dalam memperoleh pengertian suatu istilah akuntansi pemerintahan, maka pada tahun 2007 KSAP akan menyusun suatu kamus istilah akuntansi pemerintahan.

## 12. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

## 13. International Events

Untuk mensejajarkan KSAP dengan *government/public accounting standard setting body* di dunia internasional, maka pada tahun 2007 KSAP akan menyelenggarakan International Events. Hal ini masih bersifat tentatif tergantung dari peninjauan yang akan dilakukan atas kemungkinan penyelenggaraan kegiatan ini pada tahun 2007.



## Rencana Kerja KSAP 2007

1. Penyusunan 4 PSAP AkruaI	Jan – Mei 2007
2. Finalisasi KK dan 11 PSAP	Jan – Mei 2007
3. Limited Hearing 4 PSAP AkruaI	Juni 2007
4. Public Hearing SAP AkruaI	Oktober 2007
5. Pemeliharaan Helpdesk dan Website KSAP	Januari – Desember
6. Workshop SAP	Triwulan I dan II
7. Training of Trainers SAP	Triwulan II dan III
8. Pemeliharaan Website KSAP	Januari – Desember
9. Pengembangan SDM	Januari – Desember
10. Survei/Riset Implementasi SAP	Januari – Desember
11. Pelayanan Publik	Januari – Desember



## **BAB V PENUTUP**

Laporan Tahunan 2006 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Januari 2007  
Kuasa Pengguna Anggaran



*Hekinus Manao*  
Dr Hekinus Manao, Ak., M.Acc., CGFM  
NIP. 060052698

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Eksekutif	4
Laporan Keuangan	
A. Laporan realisasi Anggaran	6
B. Neraca	9
C. Catatan atas Laporan Keuangan	11
I. Pendahuluan	11
II. Kebijakan Akuntansi	12
III. Ringkasan laporan	13
IV. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
V. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	16
VI. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya	18

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA SATUAN KERJA  
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Laporan keuangan *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Unaudited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

  
Jakarta Januari 2007  
Kuasa Pengguna Anggaran  
*Hekinus Manao*  
Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., CGFM

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2006 ini disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Satuan kerja sementara di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Laporan  
Realisasi  
Anggaran*

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2006 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

*Realisasi  
pendapatan  
dan hibah*

Realisasi pendapatan dan hibah pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar **Rp 465.003,00**.

*Realisasi  
belanja*

Realisasi belanja pada TA 2006 adalah sebesar **Rp 2.970.812.390,00** atau mencapai 91.92 % dari anggaran yang berjumlah **Rp. 3.231.810.000,00**

### 2. NERACA

*Neraca*

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2006

*Jumlah  
aset Rp  
71.039.125*

Jumlah aset per 31 Desember 2006 adalah sebesar **Rp 71.039.125,00**, yang dapat diklasifikasikan aset lancar **Rp. 41.239.125,00** dan aset tetap sebesar **Rp 29.800.000,00**.

*Jumlah  
kewajiban Rp*

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2006, sebesar **Rp. 34.891.625,00** yang

34.891.625

dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek.

Jumlah  
ekuitas dana  
Rp  
36.147.500

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 36.147.500,00 dan dikelompokkan dalam ekuitas dana lancar sebesar Rp. 6.347.500,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 29.800.000,00

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas  
Laporan  
Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Penyajian  
LRA

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Penyajian  
neraca

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

## *LAPORAN REALISASI ANGGARAN*

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/EMBAGA : 015  
ESELON I : 08  
KANTOR WILAYAH : -  
SATUAN KERJA : 436105

KEUANGAN  
DITJEN PERBENDAHARAAN  
KANTOR PUSAT  
KOMITE STANDAR AKUNTANSI/PEMERINTAHAN

NO. SURAT : 1/1457  
TANGGAL : 27 Desember 2006  
LOKASI : Jakarta  
PROG. : 01.2006

No	URAIAN	2005					2006				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN		
1	2										
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI		465.003	465.003	0.00	0	0	0	0.00		
A.1.a	Penerimaan Pajak	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	465.003	465.003	0.00	0	0	0	0.00		
A.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>465.003</b>	<b>465.003</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
B	BELANJA										
B.1	Rupiah Murni	2.251.810.000	2.970.812.390	( 290.997.810)	91.92	0	0	0	0.00		
	Belanja Pegawai	559.800.000	529.100.000	( 30.700.000)	94.52	0	0	0	0.00		
	Belanja Barang	2.641.880.000	2.411.912.390	( 229.967.610)	91.30	0	0	0	0.00		
	Belanja Modal	30.330.000	29.800.000	( 530.000)	98.25	0	0	0	0.00		
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.2	Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : D15 KEUANGAN  
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH : \* KANTOR PUSAT  
SATUAN KERJA : 439165 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERIODE : 12/01/07  
MULAI : 1/01/07  
AKHIR : 31/12/06  
JAMAK : 12/01/07

No	URAIAN	2006			2005			REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.3	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.231,810.000</b>	<b>2.970,812.380</b>	<b>260.997.610</b>	<b>91,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
C	<b>PEMBAYAAAN</b>								
C.1	PEMBAYAAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri (Horo)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.2	PEMBAYAAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.2.a	Perbankan Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.2.b	Pembayaran Cukai Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>JUMLAH PEMBAYAAAN (C.1 +C.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# *LAPORAN NERACA*

**NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2006  
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : LSAIKB  
Tanggal : 20/01/07  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN  
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT  
SATUAN KERJA : 439165 KOMITE STANDAR AKUNTRANSI PEMERINTAHAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Bendahara Pengeluaran	34,891,625
Persediaan	6,347,500
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>41,239,125</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Peralatan dan Mesin	29,800,000
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>29,800,000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>71,039,125</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Uang Muka dari KPPN	34,891,625
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>34,891,625</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>34,891,625</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	
Cadangan Persediaan	6,347,500
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>6,347,500</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	29,800,000
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>29,800,000</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>36,147,500</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>71,039,125</b>

Jakarta, ..... Januari 2007  
 Bertanggung Jawab SAI  
  
 Syarif, SE, AKMM  
 NIP. 090090042

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA  
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**

---

Laporan keuangan tahun 2006 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai

## **I. PENDAHULUAN**

### *Dasar Hukum*

#### **A. DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-24/PB/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan keuangan Kementerian / Lembaga.

## B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan** yang berasal dari dana APBN sebesar Rp 3.231.810.000,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sepuluhribu rupiah).

Laporan Keuangan **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan** terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran **telah** dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya.

Penyusunan data neraca untuk aset tetap **telah** menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

## II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

### Pendapatan

#### A. PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### Belanja

#### B. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

*Aset*

### **C. ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

*Kewajiban*

### **D. KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan.

*Ekuitas dana*

### **E. EKUITAS DANA**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

## **III. RINGKASAN LAPORAN**

*Anggaran Belanja  
Rp. 3.231.810.000*

### **A. ANGGARAN DAN ESTIMASI PENDAPATAN**

Selama periode Tahun Anggaran 2006 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menerima alokasi anggaran sesuai DIPA sebesar Rp **3.231.810,00** yang digunakan untuk membiayai kegiatan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kegiatan KSAP pada Tahun 2006 sebagai berikut:

- Penyusunan SAP berbasis akrual
- Penyelenggaraan Limited Hearing DPSAP berbasis Akrual
- Penyusunan Buletin teknis PSAP

*Estimasi  
Pendapatan dan  
Hibah Rp 0*

- Workshop SAP (Cash Toward Accrual) dan Buletin Teknis
- TOT SAP (Cash Toward Accrual)
- Pemeliharaan Website KSAP.
- Penyelenggaraan Help Desk.
- Survei/Riset Implementasi SAP
- Peningkatan Sumber Daya Manusia
- Pelayanan Public

Pada Tahun 2006, sebagai satuan kerja sementara, **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan** tidak mendapat alokasi pendapatan

## **B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA**

*Realisasi Belanja  
Rp 2.970.812.390*

Dari anggaran Rp **3.231.810,00** terealisasi sebesar **Rp 2.970.812.390,00** atau 91.92 % dari total anggaran.

*Realisasi  
pendapatan dan  
hibah  
Rp. 465.003,00*

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp 465.003,00, yang berasal dari pendapatan jasa Lembaga Keuangan (jasa giro Bendahara) .

## **C. NERACA**

*Neraca*

Posisi keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 31 Desember 2006 sebagai berikut: Aset sebesar **Rp 71.039.125,00**. Kewajiban sebesar **Rp 34.891.625,00** dan Ekuitas Dana sebesar **Rp 36.147.500,00**.

*Aset Rp  
71.039.125*

Jumlah Aset sebesar Rp **71.039.125,00** berupa Aset Lancar sebesar Rp **41.239.125,00** dan Aset Tetap sebesar Rp **29.800.000,00**.

*Kewajiban  
Rp 34.891.625*

Jumlah Kewajiban yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp **34.891.625,00**

*Ekuitas Dana Rp.  
36.147.500.*

Jumlah ekuitas dana sebesar Rp **36.147.500,00** terdiri dari ekuitas dana lancar Rp **6.347.500,00** dan ekuitas dana investasi sebesar Rp **29.800.000,00**.

*Realisasi  
Pendapatan*

## **IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **A. PENDAPATAN**

### A.1. Realisasi Pendapatan

PNBP  
Rp. 465.003

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.465.003,00 yang berasal dari jasa Lembaga Keuangan (jasa giro Bendahara).

## B. BELANJA

Realisasi belanja  
Rp. 3.008.477.640

### B.1. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Jumlah realisasi belanja bruto Rp. 3.008.477.640,00

Jumlah pengembalian belanja Rp. 37.665.250,00

Jumlah belanja netto Rp. 2.970.812.390,00

Perincian Anggaran dan realisasi belanja bruto dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Rincian anggaran  
dan realisasi  
belanja per sumber  
dana  
Rp.3.008.477.460

Tabel.1  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
Rupiah Murni	Rp.3.231.810.000	Rp.3.231.810.000	Rp.3.008.477.460	93,09%
Pinjaman LN	Rp.	Rp.	Rp.	.....%
Hibah	Rp.	Rp.	Rp.	.....%
Rupiah Murni Pendamping	Rp.	Rp.	Rp.	.....%
PNBP	Rp.	Rp.	Rp.	.....%
Jumlah	Rp.3.231.810.000	Rp.3.231.810.000	Rp.3.008.477.460	93,09%

Rincian anggaran  
dan realisasi  
belanja per jenis  
belanja  
Rp.3.008.477.640

Tabel.2  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	Persentase
-----------------	----------------------	-------------------------	-------------------	------------



1	2	3	4	5=(4/3)x100%
51	Belanja Pegawai	Rp. 559.800.000	Rp. 529.100.000	94,51 %
52	Belanja Barang	Rp.2.641.680.000	Rp.2.449.577.640	92,73 %
53	Belanja Modal	Rp. 30.330.000	Rp. 29.800.000	98,25.%
	Jumlah	Rp.3.231.810.000	Rp.3.008.477.640	93,09 %

Rincian realisasi  
belanja modal  
Rp29.800.000

Tabel.3  
Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode MAK.	Uraian Belanja Moda I(BM)	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
531111	BM Tanah	Rp.	Rp.	.....%
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp.30.330.000	Rp.29.800.000	98,25 %
533111	BM Gedung dan Bangunan	Rp.	Rp.	.....%
534111	BM Jalan dan Jembatan	Rp.	Rp.	.....%
534112	BM Irigasi	Rp.	Rp.	.....%
534113	BM Jaringan	Rp.	Rp.	.....%
535111	BM Fisik Lainnya	Rp.	Rp.	.....%
	Jumlah	Rp. 30.330.000	Rp.29.800.000	98,25 %

Pengembalian  
Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp 37.665.250,00 dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan.

Pada tahun anggaran 2006 pengembalian belanja KSAP sebesar Rp. 37.665.250,00 yang berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas biasa.

Rincian Realisasi  
pengembalian  
belanja per jenis  
belanja  
Rp.37.665.250

Tabel.4  
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	4
51	Belanja Pegawai	Rp.
52	Belanja Barang	Rp. 37.665.250.
53	Belanja Modal	Rp.
57	Belanja Bantuan Sosial	Rp.
	Jumlah	Rp. 37.665.250

Hambatan dan  
kendala

## B.2. Hambatan dan Kendala

Tidak ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan

## V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di bendahara  
pengeluaran  
Rp.34.891.625

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan* per *31 Desember 2006* sebesar Rp *34.891.625,00*.

Pada tanggal *2 Januari 2007* telah disetor Rp. *36.222.875,00*. ke Kas Negara yang terdiri dari Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. *34.891.625,00*. dan Kelebihan belanja sebesar Rp. *1.331.250,00*.

Rincian penyetoran  
kas di bendahara  
pengeluaran  
Rp.36.222.875

Tabel.5  
Rincian penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Tanggal SSBP	Jumlah Rupiah
1	2	3
1	2 Januari 2007	Rp. 36.222.875
	Jumlah	Rp. 36.222.875

Persediaan  
Rp. 6.347.500

## B. PERSEDIAAN

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat Persediaan pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. *6.347.500,00* yang diperoleh dari hasil inventarisasi

Aset Tetap  
Rp.29.800.000

## C. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap pada satuan kerja sementara KSAP berasal dari pengadaan barang pada tahun 2006 sebesar Rp. 29.800.000,00

Nilai aset tetap per 31 Desember 2006 tersebut berupa peralatan dan

mesin yang terdiri dari :

No	Uraian Barang	Jumlah	Jumlah Rupiah	Keterangan
1	PC Unit	1	13.400.000	Merk HP
2	Printer	3	16.400.000	Printer/Scanner/Copier

*Uang muka dari  
KPPN  
Rp. 34.891.625*

#### **D. UANG MUKA DARI KPPN**

Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif.

Jumlah uang muka dari KPPN pertanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 34.891.625,00. Atas jumlah tersebut telah disetor pada tanggal 2 Januari 2006.

*Ekuitas Dana  
Investasi  
Rp. 29.800.000*

#### **E. EKUITAS DANA INVESTASI**

Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal 31 Desember 2006, terdiri atas:

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 29.800.000.00
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp. 0

*Informasi  
tambahan dan  
pengungkapan  
lainnya*

#### **VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA**

Sebagai informasi tambahan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan pembukuan atas SPM/SP2D,

No /Tgl SPM	:	00060/KSAP/2006	20-11-2006
No./Tgl SP2D	:	116836E	22-11-2006
Kode F/SF/P	:	01/01/0122	
Kode Keg/Sub Keg	:	7532.0311	
Jumlah seharusnya	:	90.222.500	

Jumlah pada SPM/ SP2D :	91.553.750	
Selisih	Rp. 1.331.250	

Keterangan : Hal ini mengakibatkan terjadi kelebihan belanja sebesar 1.311.250,00. Kelebihan jumlah belanja tersebut diatas telah disetor oleh bendahara pengeluaran pada tgl 2 Januari 2007.

2. Pada tanggal 31 Desember 2006 masih ada sisa uang persediaan sebesar Rp. 34.891.625,00 dan disetor pada tanggal 2 Januari 2007.

